

**Kawasan Heritage Gajah Mada—
Dilema Mempertahankan Pusaka atau Menyelamatkan Nyawa
Oleh: Joshua Jolly Sucanta Cakranegara**

Bertepatan dengan Hari Raya Pagerwesi yang jatuh pada 10 September 2025 lalu, Denpasar diterjang bencana banjir. Denpasar, sebagai jantung Pulau Bali luluh lantak akibat air bah dan menjadi bencana terparah selama 10 tahun terakhir. Tak hanya harta benda yang hanyut dan hilang namun juga nyawa manusia

Seketika Jalan Gajah Mada, Denpasar yang merupakan Kawasan Heritage, lumpuh total. Seperti diketahui, Gajah Mada dan sekitarnya merupakan kawasan yang memiliki nilai bersejarah, warisan pusaka sekaligus pusat denyut nadi perekonomian Denpasar. Tidak hanya tempat peredaran uang, tetapi juga pertukaran budaya hidup di dalamnya.

Jika pada 2008 kawasan ini resmi ditetapkan sebagai kawasan heritage yang disimbolkan dengan prasasti di ujung barat Jalan Gajah Mada, kini pada 2025, 17 tahun kemudian, kawasan ini justru menjadi pusat kerusakan paling parah akibat bencana banjir.

Kini, pemerintah perlu berpikir keras agar dapat menjaga wilayah tersebut dari ancaman bencana karena selain kawasan heritage juga merupakan pusat ribuan orang mencari nafkah. Kawasan yang terbentang di sepanjang aliran Tukad Badung ini perlu mendapat perhatian serius terkait ketahanan bencana di masa depan.

Pemerintah juga perlu merelokasi pedagang di Kawasan Heritage Jalan Sulawesi karena berdiri di bantaran Tukad Badung yang rawan bencana. Selanjutnya mengembalikan fungsi bantaran sungai sebagai ruang terbuka dan resapan.

Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat ancaman bencana bisa datang kapan saja. Potensi datangnya air bah saat musim hujan ekstrem dapat menjadi ancaman serius jika tidak ditanggulangi sejak dini. Terlebih lagi, kondisi tebing atau pinggir Tukad Badung yang ditutupi oleh beton menyebabkan ruang resapan air berkurang serta menghalangi jalur alami Tukad Badung.

Penataan Tukad Badung yang populer dengan nama Tukad Korea (karena estetika yang dibangun) yang dilakukan sejak 2024, kini mesti berpacu dengan waktu untuk membangun ketahanan bencana. Tukad Korea yang hendak dilanjutkan ke sisi selatan, yaitu di sepanjang sisi barat Jalan Sulawesi dan yang dilewati oleh Jalan Hasanuddin, juga harus dibangun sistem antisipasi bencana.

Dengan demikian, timbul pertanyaan atas kelanjutan rencana penataan estetika ini. Meski gagasan besarnya adalah konservasi sungai, edukasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan, namun perlu juga upaya menjaga kawasan pusaka tersebut dari bencana.

Beberapa pedagang di Kumbasari yang terdampak banjir bandang 10 September 2025 lalu, telah diupayakan untuk direlokasi ke tempat yang aman yaitu di Pasar Badung pelataran. Sedangkan pedagang kain di Jalan Sulawesi juga harus dipindahkan demi keselamatan, walaupun akhirnya kompleks ruko yang merupakan bagian dari kawasan heritage harus dikorbankan.

Di sinilah letak dilema yang perlu dipecahkan antara ancaman putusnya hubungan sosial, ekonomi, dan warisan budaya lokal yang ada dalam Kawasan Heritage Gajah Mada dengan bencana alam yang sewaktu-waktu datang tanpa peringatan. Jika ancaman bencana alam menjadi ancaman besar maka berarti solusi yang ditawarkan tidak sesederhana membongkar bangunan di bantaran Tukad Badung.

Karena persoalan utamanya bukan hanya soal beton dan bangunan yang berdiri di bantaran sungai, melainkan ada faktor lain seperti pendangkalan dan penyempitan Tukad Badung, ditambah lagi, belum terselesaikannya sistem drainase yang terhambat, alih fungsi lahan yang masif di daerah hulu sungai, hingga pengelolaan sampah yang tidak terkendali. Dengan demikian, persoalan menjadi semakin kompleks sehingga perlu perhatian yang serius.

Isu relokasi untuk merawat Kawasan Heritage Gajah Mada dalam banyak hal juga dinilai minim konsultasi dan partisipasi publik. Ada hal-hal krusial yang perlu dipersiapkan dengan matang apabila benar-benar langkah ini diambil. Hak milik, hak waris, dan hak-hak sosial-ekonomi-

budaya yang telah melekat atas mereka selama ini menjadi prioritas. Jangan sampai, kebijakan *top-down* menjadi kacamata utama dalam memandang solusi atas dilema ini.

Oleh sebab itu, untuk menjamin relokasi pedagang dan pengembalian fungsi kawasan bantaran Tukad Badung berjalan dengan maksimal serta mempertahankan kearifan lokal yang terkandung dalam Kawasan Heritage Gajah Mada, beberapa hal perlu ditindaklanjuti.

Pertama, inventarisasi dan dokumentasi heritage. Pemerintah perlu memastikan bahwa dokumentasi atas kawasan ini tercatat dan tersimpan dengan baik agar meskipun kawasan ini mengalami perubahan bentuk, narasi dan nilai sejarah tetap dapat terwariskan lintas generasi.

Kedua, kajian risiko dan alternatif desain. Kajian risiko bencana terhadap kawasan ini perlu memetakan bangunan yang paling rentan serta mempertimbangkan alternatif desain yang kokoh sekaligus estetis. *Ketiga*, kompensasi yang adil bagi para pedagang yang terdampak. Skema tukar guling harus transparan dan berjalan harus dengan pendampingan berkelanjutan kepada mereka di tempat yang baru.

Keempat, partisipasi masyarakat dan keterbukaan publik. Pemerintah sudah semestinya mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka yang terdampak, juga tokoh masyarakat dan ahli yang berkompeten di bidangnya, khususnya di bidang sejarah, budaya, arsitektur, dan kebencanaan.

Kelima, penguatan regulasi dan pengawasan. Regulasi yang melindungi kawasan bantaran sungai dari bangunan yang tidak semestinya perlu ditegakkan. Begitu pula dengan konservasi bangunan heritage yang tidak kalah pentingnya.

Keenam, integrasi strategi penataan sungai dan ruang terbuka. Di sinilah letak penataan sungai yang holistik, yaitu melibatkan ekologi dan estetika yang alami, tidak sekadar ornamen sintesis yang memberi kesan semu, serta memperbaiki sistem drainase kota secara keseluruhan.

Pada akhirnya, bencana banjir 10 September 2025 mengingatkan kita bahwa Kawasan Heritage Gajah Mada adalah kawasan rawan bencana. Dari sudut pandang ketahanan bencana dan mitigasi

risiko bencana, rencana relokasi dan alih fungsi kawasan bantaran sungai adalah rencana yang tepat. Akan tetapi, agar rencana ini tidak merusak nilai sejarah, budaya, dan ekonomi masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, perlu adanya pendekatan yang partisipatif dan adil. Identitas kolektif perlu dipelihara dan dilindungi, sembari menyelaraskan diri dengan kawasan di sekitarnya agar Kawasan Heritage Gajah Mada tetap lestari.